

ABSTRAK

Penanganan perkara ujaran kebencian oleh pihak kepolisian pada kenyataannya terkesan pilih-pilih dan tidak adil. Hal tersebut dapat dilihat dari lambannya penanganan perkara ujaran kebencian yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok tertentu yang pro pemerintah terhadap orang atau kelompok tertentu yang dipandang berseberangan dengan pemerintah.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bagi pelaku tindak pidana ujaran kebencian, untuk mengetahui dasar pertimbangan penegak hukum dalam penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bagi pelaku tindak pidana ujaran kebencian (Studi Kasus Putusan No. 370/Pid.sus/2018/PN.Jkt.Sel).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah *Yuridis Normatif* atau penelitian hukum normatif. Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini bersifat *deskriptif analisis*. Sumber dan Jenis Data dalam penelitian ini data primer dan data sekunder.

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bagi pelaku tindak pidana ujaran kebencian telah dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan dan tuntutan seperti dalam perkara Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel) Dengan terdakwa Ahmad Dhani yang didakwa melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan dituntut 2 tahun penjara, namun majelis hakim menjatuhkan vonis 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara. Dalam perkara lain, yaitu perkara Buni Yani, Jaksa Penuntut Umum mendakwa ia melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (1), sehingga dituntut 2 tahun penjara, namun majelis hakim menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara. Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan penegak hukum dalam penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bagi pelaku tindak pidana ujaran kebencian, yaitu Hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan didasarkan pada perbuatan yang dilakukan serta akibat yang timbul dari perbuatan tersebut seperti tidak menyesali perbuatannya karena tidak merasa bersalah, tindakannya dapat menyebabkan perpecahan golongan, menimbulkan keresahan di masyarakat, meresahkan umat beragama.Hal-hal yang meringankan didasarkan pada sikap dan kondisi terdakwa selama persidangan serta riwayat hidup terdakwa seperti belum pernah dihukum, bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan berlangsung, Punya beban keluarga.

Kata Kunci : Penerapan; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Pelaku; Tindak Pidana; Ujaran Kebencian

ABSTRACT

The handling of hate speech cases by the police in fact seems to be picky and unfair. This can be seen from the slow handling of hate speech cases carried out by a person or certain group that is pro-government towards certain people or groups who are seen as opposed to the government.

The objectives to be achieved in this study are to find out the application of Law Number 11 Year 2008 Concerning Information and Electronic Transactions for perpetrators of hate speech crime, to find out the basis for law enforcement considerations in the application of Law Number 11 Year 2008 Concerning Information and Transactions Electronics for perpetrators of hate speech (Case Study of Decision No. 370 / Pid.sus / 2018 / PN.Jkt.Sel).

The method of approach used in writing this law is Normative Jurisprudence or normative legal research. The research specifications in this writing are analytical descriptive. Sources and Types of Data in this study are primary data and secondary data.

From the results of the research and discussion it can be concluded: Application of Law Number 11 Year 2008 Regarding Information and Electronic Transactions for perpetrators of criminal acts of hate speech has been carried out by law enforcement officials, namely the Public Prosecutor filing charges and claims as in case Number 370 / Pid. Sus / 2018 / PN.Jkt.Sel) with the defendant Ahmad Dhani who was charged with violating the provisions of Article 28 paragraph (2) and demanded 2 years in prison, the panel of judges sentenced him to 1 (one) year 6 (six) months in prison. In another case, namely the case of Buni Yani, the Public Prosecutor claimed that he violated the provisions of Article 32 paragraph (1), so that he was demanded 2 years in prison, but the panel of judges sentenced him to 1 year 6 months in prison. The things that become the basis for law enforcement considerations in the application of Law Number 11 Year 2008 Regarding Information and Electronic Transactions for perpetrators of criminal acts of hate speech, namely incriminating matters and mitigating matters. Incriminating things are based on the actions carried out and the consequences arising from such actions such as not regretting their actions because they do not feel guilty, their actions can cause class divisions, cause unrest in society, unsettle religious people. Relief things are based on attitudes and the condition of the defendant during the trial as well as the life history of the defendant as if he had never been convicted, being polite and cooperative during the trial, having a family burden.

Keywords: *Implementation; Law Number 11 Year 2008; Perpetrators; Criminal act; Hate Speech*